

BAB I

PENDAHULUAN

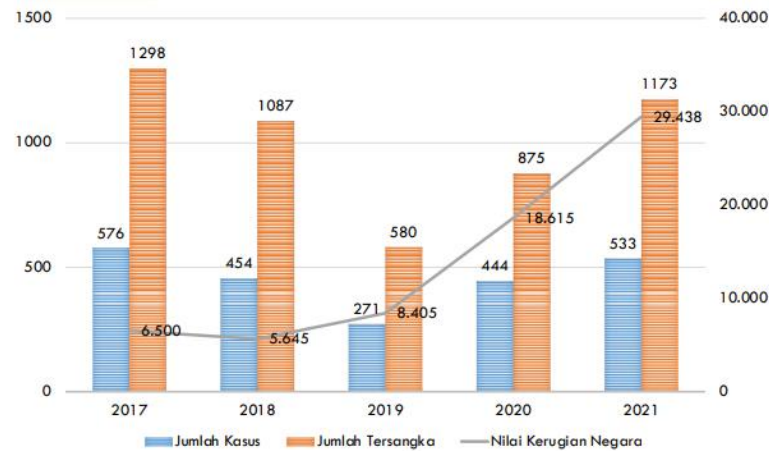
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pancasila sebagai Dasar Negara (*philosophische grondslaag*) merupakan kesepakatan para pendiri bangsa dan konsensus nasional dari semua golongan masyarakat Indonesia untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara. Sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup (*weltanschauung*) negara Indonesia, Pancasila digali oleh para pendiri bangsa dan diwariskan ke generasi selanjutnya secara simultan sebagai petunjuk sekaligus pengarah bagi bangsa Indonesia dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kondisi bangsa hingga saat ini masih jauh dari harapan cita ideal tersebut dalam mengaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan falsafah atau pandangan hidup. Kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini masih selalu diwarnai krisis etika serta moral yang disertai pengingkaran terhadap nilai-nilai keutamaan yang diyakini sebagai nilai luhur bangsa selama ini.

Sejarah panjang di dalam praktik penyelenggaraan negara, mengisahkan problematika fenomenal tarik-menarik antara cita-cita kemanusiaan dan tujuan kekuasaan semata, antara tujuan mulia negara dan kemunduran peradaban. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia setelah puluhan tahun merdeka, sampai saat ini masih ditandai stagnasi, dan distorsi, dan deviasi dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan ditimbang dari jiwa, pemikiran, dan cita-cita nasional yang diletakkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Revolusi bangsa Indonesia telah membawa akibat-akibat post-revolusi berupa kerusakan-kerusakan yang bukan hanya fisik, tetapi juga mental berupa sifat mental yang meremehkan mutu, sifat mental yang suka menerabas, sifat tak percaya terhadap diri sendiri; sifat tak berdisiplin murni dan sifat mental yang suka mengabaikan tanggung jawab yang kokoh (Koentjaraningrat, 2004: 43-45).

Kondisi tersebut semakin dilematis karena deraan globalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Globalisasi yang terjadi dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi telah mentransformasikan proses bisnis pada berbagai aspek kehidupan manusia secara revolusioner pada era Revolusi Industri 4.0 dewasa ini. Dalam era Revolusi Industri 4.0 tersebut, Bangsa Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius baik yang bersumber dari situasi global maupun situasi nasional, antara lain menguatnya individualisme, liberalisme pasar, radikalisme fundamentalisme agama, kosmopolitanisme, ideologi transnasional, dan dominasi sistem hukum modern yang menegaskan makna nasionalisme. Secara faktual bangsa Indonesia menghadapi kondisi melemahnya aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berakibat pada melemahnya kelembagaan Pancasila secara signifikan. Kondisi tersebut selanjutnya berakibat pada rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Lebih lanjut, rendahnya keteladanan dari para penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia secara langsung berkontribusi pada terjadinya eksklusivisme sosial dan kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat dewasa ini. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditemukan fenomena yang paling mencolok yaitu maraknya kasus korupsi, neo-liberalisme yang telah merasuk dalam setiap relung kebijakan ekonomi dan politik, serta masih maraknya praktik-praktik intoleransi dan radikalisme yang mengganggu keberagaman dan harmoni kehidupan bangsa.

Fenomena kasus korupsi di Indonesia pada perkembangannya semakin mengawatirkan. Hal ini sebagaimana data yang dipaparkan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) tercatat ada 533 penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) sepanjang 2021. Dari seluruh kasus tersebut, total potensi kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp 29.4 triliun. Namun, tren nilai potensi kerugian negara cenderung terus meningkat selama periode 2017-2021, seperti terlihat pada grafik berikut:



Grafik 1.1

Tren Peningkatan Kerugian Negara akibat Korupsi dalam 5 Tahun Terakhir
 Sumber: *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, 18 April 2022

Berdasarkan grafik tersebut menurut ICW, penindakan kasus korupsi oleh APH sejak tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif, sedangkan potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.

Fenomena lainnya berkenaan dengan telah merasuknya neo-liberalisme dalam setiap relung kebijakan ekonomi dan politik, ditandai salah satunya dengan dikuasanya sektor kepemilikan umum oleh swasta. Akibat menganut sistem mekanisme pasar bebas Pemerintah Indonesia harus melepaskan perannya dalam berbagai pengelolaan ekonomi yang ditandai dengan banyak dikuasanya sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak (sektor kepemilikan umum) baik dengan cara langsung maupun melalui proses privatisasi BUMN oleh swasta.

Berdasarkan beberapa fenomena tersebut terdapat situasi yang memperlihatkan adanya paradok dan konflik nilai yang menyebabkan dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat Indonesia telah kehilangan banyak makna yang pada akhirnya telah melemahkan sendi-sendi kehidupan. Lebih jauh dari masalah krusial dan kondisi bertentangan tersebut, jika dibandingkan dengan bangsa lain Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal. Fenomena tersebut harus dapat menyadarkan pemerintah dan masyarakat akan pentingnya melakukan

rekonstruksi kehidupan bangsa yang bermakna dalam semua bidang kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun budaya agar tercapainya kondisi bangsa dan negara Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, serta berdaulat dengan menjunjung nilai dasar Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Untuk mendorong kebangkitan kembali Pancasila hanya dimungkinkan bila mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh Soekarno yaitu dengan menggali kembali mutiara terpendam, mengargumentasikan, kontekstualisasikan, dan mengaktualisasinya dalam berbagai kehidupan (Latif, 2012).

Pemerintahan sebenarnya sudah berupaya melawan gerakan anti Pancasila. Salah satunya adalah dengan merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila melalui BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Melalui badan ini Pemerintah berupaya melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi, serta pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan. Sisi lain juga Pemerintah melakukan usaha-usaha penguatan ideologi Pancasila dalam Program Revolusi Mental di berbagai tempat seperti kampus, instansi Pemerintah maupun swasta, pada media massa, juga forum-forum kemasyarakatan. Namun muara yang diharapkan oleh Pemerintah dari program tersebut yaitu penguatan dan pemahaman masyarakat atas ideologi Pancasila belum dapat tercapai. Pada kondisi ini kita dapat melihat bahwa nilai moral publik seperti Pancasila baru sebatas dikreasikan oleh negara, disosialisasikan, dan diinjeksikan kepada warga negara. Sosialisasi Pancasila dijalankan secara vertikal: negara yang mengambil inisiatif, negara yang menafsir, negara pula yang menatar; kurang memberdayakan partisipasi masyarakat dalam usaha pengisian dan pembudayaan Pancasila; membuat Pancasila menjadi ideologi tertutup.

Selama ini negara memegang dominasi, memonopoli, dan hegemoni dalam menafsirkan Pancasila. Sementara warga negara hanya tunduk dan ikut apa kata negara. Namun jika warga negara dianggap bertentangan dengan tafsir moral publik oleh negara, maka akan dianggap melawan negara. Hal ini rentan dimanipulasi negara, sehingga Pancasila dijadikan sebagai alat pemukul untuk membungkam kritik dan oposisi. Oleh karenanya moral negara itu tidak hanya tergantung pada negara, tapi proses pengembangannya dapat dilakukan melalui upaya swadaya

sukarela dari komunitas-komunitas agama, adat dan komunitas lain yang sama-sama merawat nilai, melalui dialog-dialog yang melahirkan konsensus-konsensus atau nilai-nilai yang disepakati bersama. Maka dari itu tafsir negara tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada monopoli negara. Gerakan-gerakan masyarakat seperti Muhammadiyah harus juga mengembangkan nilai-nilai Pancasila sehingga menjadi *check and balance* dari tafsir Pancasila oleh negara. Dengan demikian tafsir Pancasila oleh negara ini diimbangi tafsir komunitas sehingga terjadi sintesis yang sehat dan mencegah pemanipulasian Pancasila untuk kepentingan politik jangka pendek oleh kekuasaan.

Muhammadiyah melalui Muktamar Ke 47 di Makassar telah melahirkan suatu konsep dalam bernegara yaitu Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Dengan lahirnya pemikiran ini Muhammadiyah memandang bahwa Negara Pancasila merupakan *dar al-‘ahdi* (hasil konsensus nasional) dan *dar al-syahadah* (tempat pembuktian atau kesaksian) untuk mengarah pada tujuan mencapai kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat, serta ada dalam naungan rida Allah SWT. Lahirnya konsepsi ini merupakan suatu tanda adanya penolakan Muhammadiyah terhadap dominasi, monopoli, dan hegemoni tafsir Pancasila oleh negara, seperti yang dilakukan oleh Orde Lama dan Orde Baru yang selalu berakhir pada penyimpangan. Dengan ini maka dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah merupakan satu-satunya anasir *civil society* yang menafsirkan Pancasila dalam bentuk buku resmi (Yusron, 2020).

Kehadiran dari pemikiran Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* merupakan kesepakatan final Muhammadiyah mengenai konsep Negara Indonesia yang dapat dijadikan sebagai rujukan maupun orientasi pemikiran juga tindakan seluruh warga Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual. Warga Muhammadiyah secara khususnya dan pada umumnya seluruh umat Islam sebagai kekuatan mayoritas pada Bangsa Indonesia diharapkan dapat mengisi dan membangun Negara Pancasila. Dengan konsep *dār al-syahadah*, Muhammadiyah mendorong umat Islam, khususnya anggotanya untuk terlibat dalam proses pembangunan negara (Bachtiar, 2020).

Namun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dan orientasi pemikiran maupun tindakan seluruh elemen masyarakat terutama anggota Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, maka konsep ini harus dirumuskan lebih lanjut agar dapat digali nilai-nilai dasarnya guna ditemukan relevansinya dengan beragam permasalahan-permasalahan sosial yang secara dinamis berkembang di masyarakat. Selama ini Muhammadiyah belum secara serius membentuk warga negara yang bermutu selaras dengan tuntutan realitas yang dihadapi Bangsa (Sadikin & Affandi, 2019).

Oleh karenanya penelitian ini dimaksudkan untuk merekonstruksi alam pemikiran konsep negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* seperti diidealisasikan oleh organisasi dan juga para perumusanya, untuk dapat menjadi pedoman dalam berfikir dan bertindak bagi warga Muhammadiyah. Lebih jauh dari itu dapat dijadikan sebagai titik tolak bagi penentuan-penentuan kebijakan dan pedoman dalam praktik-praktik kenegaraan maupun kehidupan kemasyarakatan dalam menjawab tantangan aktual yang terus berkembang. Studi tentang pemikiran politik Muhammadiyah mengenai Negara Indonesia sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan untuk menggenapi pelbagai kekosongan dalam kajian spesifik.

Pertama, karena selama ini pengkajian terhadap pemikiran politik dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pilihan tema yang belum banyak mendapatkan perhatian. Sejauh pengetahuan peneliti, selama ini baru beberapa penelitian mengenai kajian tersebut diantaranya penelitian Rozak et al., (2015) dengan judul "*Political Thoughts and Sociocultural Nationalism Ideologies of Nurcholish Madjid on Strengthening Democracy, Civil Societies and Civic Virtues in Indonesia*" yang bertujuan untuk mengkaji pemikiran politik Nurcholish Madjid termasuk gerakan sosiokultural kewarganegaraannya, dalam rangka menguatkan *civil society* dan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada perjalanan sejarah sosial intelektual, paradigma pemikiran, dan pola gerakan sosiokultural kewarganegaraan Cak Nur, serta relevansinya dalam konteks penguatan demokrasi dan *civil society* di Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rojak yang lebih menekankan pada pemikiran politik

individu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada pemikiran Muhammadiyah sebagai organisasi serta kontribusinya pada Negara Indonesia.

Kedua, diantara penelitian mengenai *Darul Ahdi wa Syahadah* belum banyak yang mengkajinya berdasarkan disiplin Pendidikan Kewarganegaraan sebagai perspektif, baik dalam rangka mendalami maupun mengembangkan konsep tersebut. Menurut pandangan peneliti ada kajian mengenai *Darul Ahdi wa Syahadah* yang mengkajinya secara khusus melalui perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu penelitian Arif dan Aulia (2017) dengan judul “Studi tentang negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan”; penelitian Utami, (2019) dengan judul “Urgensi internalisasi nilai kemuhammadiyah berbasis wawasan kebangsaan dengan konsep negara Pancasila sebagai Darul ahli wa Syahadah”, penelitian Khakim, (2021) dengan judul “Pendekatan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berdasarkan Konsep DAWS”; dan penelitian Muthmainnah, (2021) dengan judul “Refleksi Pendidikan Pancasila, Dar al-Ahdi Wa al-Syahada, dan Islam Wasathiyah; Daya Laku (Agensi) dan Paradigma Orang Muda”.

Penelitian-penelitian tersebut menegaskan bahwa konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* dimaknai penting untuk dikembangkan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang merupakan bagian dari amal usaha Muhammadiyah yang sudah sepatutnya mengembangkan nilai-nilai Islam sesuai dengan visinya dalam setiap proses pembelajaran termasuk pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Namun Peneliti melihat bahwa kajian-kajian tersebut baru dalam tahap permulaan yang mengupas bagian permukaan dari *Darul Ahdi wa Syahadah*, dan baru sebatas mengkaji seberapa penting konsepsi tersebut dalam integrasinya ke dalam mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Berbeda dengan kajian-kajian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka objektifikasi akar pemikiran Darul Ahdi wa Syahadah pada tataran kehidupan. Dalam teknisnya berusaha mengali nilai-nilai yang terkandung dalam Konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* untuk kemudian dapat diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan pada

tingkatan persekolahan maupun perguruan tinggi di Muhammadiyah, termasuk melalui Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat. Mengingat pengintegrasian nilai keislaman dan keindonesiaan ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan dianggap penting dan sangat dibutuhkan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maka diperlukan suatu pendidikan karakter yang memadukan ideologi Pancasila dengan ideologi Muhammadiyah sebagai media perjuangan Muhammadiyah dalam proses membangun bangsa dan negara.

Dengan memasukan pemikiran-pemikiran politik Islam termasuk pemikiran Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*, maka Pendidikan Kewarganegaraan di Muhammadiyah akan memiliki nilai kekhasan jika dibandingkan dengan telaah keilmuan kewarganegaraan pada umumnya. Usaha ini juga dapat menambah khazanah dan model objek pengembangan dari ranah dimensi ontologis keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai suatu disiplin ilmu yang mandiri dan juga lintas disiplin, maka Pendidikan Kewarganegaraan membutuhkan kontribusi dari berbagai bidang ilmu agar eksistensi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan semakin kokoh. Dengan memasukan pemikiran Islam, Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia akan lebih memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karenanya konsekuensi dari penelitian ini adalah melakukan rekonstruksi objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan.

Menjadikan pemikiran politik Islam dalam objek kajian Pendidikan Kewarganegaraan merupakan langkah strategis karena akan menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang dihuni penduduk mayoritas muslim yang setia terhadap Pancasila akan semakin kokoh. Pemikiran politik yang dikembangkan para intelektual muslim seperti Muhammadiyah akan selalu berupaya mendamaikan dan mencari formulasi pemecahan masalah dengan konstruktif, kreatif dan inovatif sesuai substansi ajaran Islam dengan realitas sosial politik kebangsaan dan kenegaraan. Selama ini Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia masih belum mampu memberikan jawaban terhadap berbagai persoalan yang dihadapi peserta didik sebagai warga negara muda yang akan melanjutkan estapet kehidupan dalam masyarakat dengan bekal berbagai kemampuan warga negara yang diharapkan. Hal ini sebagaimana hasil penelitian Kerr bahwa

Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, masuk pada kategori “minimal” dengan ciri-ciri sebagai berikut: “*thin, exclusive, elitist, content-led, knowledge-based, didactic transmission, easier to achieve, civic education*” (Kerr, 1999), dan menurut Kardiman (2021) dalam hasil penelitiannya bahwa epistemologi ilmu kewarganegaraan dan program Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia akan berhasil apabila berlandaskan pada nilai-nilai religiusitas.

Kebaruan dari penelitian mengenai pemikiran politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* adalah berusaha untuk menggali pemikiran organisasi Muhammadiyah sebagai bagian integral dari objek telaah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, karena kajian seperti ini merupakan tema kajian yang belum banyak mendapatkan perhatian secara memadai. Kajian ini diharapkan dapat melahirkan pemikiran-pemikiran intelektual Islam, termasuk organisasi Muhammadiyah yang pada akhirnya dapat memperkaya khazanah keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia untuk mengimbangi banyak lahirnya teori dari pemikir-pemikir Barat. Dengan demikian maka penelitian mengenai pemikiran politik Muhammadiyah mengenai *Darul Ahdi wa Syahadah* merupakan tema kajian baru dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan, sehingga menjadi sangat penting untuk diteliti agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat akademik (*community of scholars*) di bidang Pendidikan Kewarganegaraan, baik di Perguruan Tinggi (*academic civic*), di Persekolahan (*school civic*), maupun di Masyarakat (*community civic*)

1.2 Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini untuk menggali nilai-nilai yang terkandung dalam pemikiran politik Muhammadiyah mengenai *Darul Ahdi wa Syahadah* dalam pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Muhammadiyah baik pada lingkup masyarakat, persekolahan maupun perguruan tinggi. Didalamnya termasuk bagaimana proses integrasi nilai-nilai *Darul Ahdi wa Syahadah* ke dalam

Pendidikan Kewarganegaraan di Muhammadiyah agar dapat memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada warga Muhammadiyah.

Penetapan fokus penelitian ini didasarkan pada realita bahwa masih banyak ditemukannya fenomena-fenomena pengingkaran atas nilai Pancasila. Di sisi lain pelaksanaan penanaman nilai-nilai Pancasila oleh Pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Oleh karenanya perlu adanya pelibatan unsur lain dalam masyarakat untuk dapat memasyarakatkan Pancasila. Posisi itu dapat diisi oleh lembaga kemasyarakatan yang salah satunya adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai salah satu bagian situs kewarganegaraan melalui konsep *Darul Ahdi wa Syahadah* memiliki peran strategis untuk membangun masyarakat menjadi warga negara yang baik melalui Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan melalui lembaga pendidikan Muhammadiyah baik pada lingkup persekolahan dan Perguruan Tinggi, maupun dalam lingkup pendidikan di masyarakat kepada masyarakat luas khususnya kepada kader dan anggota-anggotanya. Namun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir dan bertindak bagi warga Muhammadiyah dalam seluruh bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, maka nilai-nilai *Darul Ahdi wa Syahadah* ini perlu untuk digali terlebih dahulu.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, pemikiran politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* menarik untuk dikaji lebih mendalam, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Muhammadiyah kontekstual dengan nilai kemuhammadiyahannya yang berawal dari pemikiran organisasi maupun tokoh pendirinya. Dalam usaha itu penelitian ini berusaha menyoroti dimensi historitas, rasionalitas dan aktualitas dari konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*.

Terkait dengan fenomena di atas, permasalahan dalam disertasi ini akan dikaji dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan yang dibatasi pada hal-hal berikut:

1. Bagaimana historitas pemikiran Politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*?
2. Bagaimana rasionalitas pemikiran Politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*?

3. Bagaimana aktualitas pemikiran Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara garis besar tujuan penelitian ini terbagi ke dalam tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi empirik terkait pemikiran politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* sehingga dapat dijadikan landasan, rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan seluruh elemen masyarakat terutama warga Muhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai akar sejarah maupun pergulatan pemikiran yang menjadi latar belakang lahirnya pemikiran Politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*.
2. menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai rasionalitas pemikiran Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* berdasarkan perspektif teori dan komparatif.
3. menggali, mengkaji, dan mengorganisasikan informasi-argumentatif dan teoritik-konseptual mengenai pengamalan dari pemikiran Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* yang bersandar pada gagasan-gagasan para tokoh Muhammadiyah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tentang pemikiran politik Muhammadiyah mengenai konsep Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah* ini diharapkan memiliki manfaat, baik teoretis maupun praktis.

Secara teoritik diharapkan akan memberikan manfaat untuk memberikan kontribusi epistemologi keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bidang ilmu yang interdisipliner khususnya dalam topik kajian pengembangan pemikiran

Muhammadiyah mengenai Negara Indonesia sebagai salah satu bidang kajian keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada dimensi ini diharapkan penelitian ini dapat ditindaklanjuti sehingga melahirkan model pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Muhammadiyah berdasarkan pada konsep *Darul Ahdi wa Syahadah*, karena Pendidikan Kewarganegaraan yang dikembangkan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah sampai saat ini belum mampu menemukan relevansi nilai-nilai Islam dan nilai-nilai keindonesiaan dengan fenomena-fenomena sosial yang berkembang ditataran masyarakat. Untuk itu Pendidikan Kewarganegaraan yang ada di Muhammadiyah harus kontekstual dengan nilai kemuhammadiyah yang berawal dari pemikiran organisasi maupun tokoh pendirinya.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keislaman Muhammadiyah, yang pada akhirnya akan melahirkan konsep negara ideal yang diidam-idamkan sehingga dapat menjadi alternatif solusi pemecahan persoalan bangsa Indonesia ditengah-tengah keprihatinan akan adanya krisis yang mendera kehidupan kebangsaan saat ini.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Sistematika penulisan disertasi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan struktur organisasi disertasi. Bagian ini memaparkan tentang adanya kesenjangan antara keharusan dengan kenyataan dimana bangsa Indonesia yang telah merdeka lebih dari 70 Tahun seharusnya sudah mencapai kondisi bangsa dan negara Indonesia yang maju, adil, makmur, bermartabat, serta berdaulat dengan menjunjung nilai dasar Pancasila dan cita-cita kemerdekaan. Namun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara terdapat situasi yang memperlihatkan adanya paradok dan konflik nilai yang menyebabkan Bangsa Indonesia dianggap tertinggal dari Bangsa lainnya dalam berbagai aspek kehidupan. Kenyataan ini mendorong peneliti untuk dapat melakukan kajian secara

mendalam dengan harapan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi positif dari segi keilmuan dalam upaya menyelesaikan masalah bangsa. Pada Bab II kajian pustaka berisi konsep-konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan kajian penelitian, termasuk hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Semua bahan pustaka ini kemudian oleh peneliti dijadikan sebagai bahan pembanding untuk meletakkan dasar teori yang tepat dalam memecahkan masalah penelitian. Pada Bab III metode penelitian, didalamnya terdiri dari desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, sumber data, validitas dan reabilitas, analisis data, alur penelitian dan isu etik. Mengingat urgensi penelitian ini mengarah pada pendekatan kualitatif maka sumber data penelitian akan banyak diperoleh dari data wawancara, studi dokumentasi, dan observasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan *grounded theory*. Pada Bab IV tentang hasil dan pembahasan mencakup didalamnya yang membahas tentang hasil-hasil penelitian yang disajikan berdasarkan hasil pengolahan dan analisa data secara tematik untuk menjawab masalah penelitian. Pembahasan dilakukan secara proporsional dan analitis untuk mendapatkan kesimpulan secara ilmiah. Pada Bab V berisi tentang simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.